

RENJA PERUBAHAN DINAS PERTANIAN TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
JI. Kihajar Dewantara, Boroko. Kode Pos 35765

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat yang diberikan sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan SKPD) Dinas Pertanian Tahun 2024. sebagai amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Kerja perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan hasil kompilasi musrenbang tingkat kecamatan, forum SKPD dan musrenbang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara serta disinergikan dengan target kinerja dalam Renstra Dinas Pertanian dan untuk tahun anggaran 2024.

Guna mendukung tercapainya visi dan misi Bupati Bolaang Mongondow Utara maka disusunlah Rencana kerja perubahan 2024 seiring dangan perubahan RKPD. Rencana kerja perubahan 2024 merupakan dokumen yang diharapkan dapat menjadi pedoman dan arahan bagi berbagai bentuk program dan kegiatan agar dapat dilaksanakan secara terencana, berkelanjutan dan terintegrasi sebagai upaya dalam menggapai visi dan misi Bupati Bolaang Mongondow Utara.

Harapan kami semoga rencana kerja perubahan ini benar-benar dapat bermanfaat bagi tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan pertanian di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Boroko, 04 Juli 2024



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	4
2.1. Evaluasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024	5
2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian	12
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Tujuan dan Sasaran	21
3.2. Perubahan Program dan Kegiatan	23
BAB IV. PENUTUP	30

Lampiran

Halaman

Tabel 2.1 : Capaian Kinerja SKPD s.d Triwulan II Tahun 2024 6

*Tabel 3.1 : Rekapitulasi Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2024
Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 25*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan SKPD (Renja Perubahan SKPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu tahun Penyusunan Renja Perubahan Dinas Pertanian ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD Dinas Pertanian Tahun 2024 serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan Renja Dinas Pertanian mengacu pada rancangan awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, RKPD Dinas Pertanian serta usulan dari masyarakat. Sebagai dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang pertanian, maka kebijakan yang diambil dalam penyusunan renja dinas pertanian selalu diselaraskan dengan kebijakan umum kepala daerah dan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian sebagai pembantu presiden dalam mencapai visi dan misi Nasional.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sitem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan menteri dalam negeri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Permerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mogondow Utara menyusun Rencana Kerja perubahan tahun 2024 yang berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2024–2026.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang Nomor 10 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Evaluasi Rancangan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 80);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023;
8. Peraturan Bupati nomor 15 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 15).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 03 Tahun 2023 Tantang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
12. Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Penyusunan Renja SKPD ini dimaksudkan memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil/aparat dinas dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas dibidang pertanian sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan

di tahun 2024 dapat tercapai. Perencanaan kegiatan dan anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang akan ditindak lanjuti dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran perubahan (RKA Perubahan) tahun 2024.

Tujuan penyusunan Renja SKPD adalah sebagai dasar dalam perumusan Program dan Kegiatan pembangunan Pertanian dalam arti luas pada Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024
- 2.2 Isu – Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
- 2.3 Penelaahan perubahan usulan program/ kegiatan perangkat daerah menggambarkan analisis perlunya dilakukan perubahan/ pergeseran anggaran pada perangkat daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran
- 3.2. Perubahan Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Hasil Evaluasi Rencana Kerja Dinas Pertanian sampai dengan triwulan II realisasi anggaran sebesar 38,33 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 17.723.044.084,- yang terdiri dari 6 program, 15 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah capaian kinerjanya sebesar 64,02% kegiatan ini merupakan kegiatan rutin penunjang pemenuhan kebutuhan OPD.
2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian capaian kinerjanya sebesar 0,00%. Pada kegiatan ini sebagian besar anggarannya dari DAK Fisik dimana kegiatan ini dalam proses, ada beberapa kegiatan yang masih menunggu hasil pengumuman tender dari LPSE.
3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian capaian kinerjanya sebesar 5,67%, kegiatan ini merupakan kegiatan yang mendukung sarana Pertanian . Pada kegiatan ini sebagian besar kegiatannya ada di triwulan III dan IV.
4. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian capaian kinerjanya sebesar 18,65%. Pada kegiatan ini sebagian besar kegiatannya ada di triwulan III dan IV yaitu pengadaan peralatan mesin Pertanian.
5. Program Penyuluhan Pertanian capaian kinerjanya sebesar 15,51%. Pada kegiatan ini sebagian besar kegiatannya ada di triwulan III dan IV.
6. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner capaian kinerjanya sebesar 22,91%. Pada kegiatan ini sebagian besar kegiatannya ada di triwulan III dan IV.

Tabel 2.1
Capaian Kinerja SKPD s.d Triwulan II Tahun 2024

SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA s.d TRIWULAN II TAHUN 2024				
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
		(1)	(2)	(3)	(4)	5=(4/3)
DINAS PERTANIAN		RATA-RATA KINERJA :		50,42		
3 3.3	URUSAN PILIHAN Urusan Pilihan Pertanian <u>Dinas Pertanian</u>					
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Efektifitas pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	64,02	64%
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	66,03	66%
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	8	57%
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	50	50%
3.27.01.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	0	0%
3.27.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	8	4	50%
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	25,04	25%
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	0	0%
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	1	0,22	22%
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	1	0,25	25%

SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA s.d TRIWULAN II TAHUN 2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)		(2)		(3)	(4)	5=(4/3)
3.27.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	0	0%
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	0,2733	27%
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	0	0%
3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	6	0	0%
3.27.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	2	0	0%
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	43	43%
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	0,06	6%
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	1	0,2	20%
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	1	0,5	50%
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	12	12%
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	66	10	15%
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya dan Perizinannya	Unit	2	0	0%

SKPD/PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA s.d TRIWULAN II TAHUN 2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
				(1)	(2)	(3)
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	60	28	47%
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1	0	0%
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas tanaman Pangan				48%
		Produktivitas tanaman pangan (padi)	Ku/Ha	55,00	25,00	45%
		Produktivitas tanaman pangan (jagung)	Ku/Ha	55,00	35,00	64%
		Produktivitas Perkebunan				
		Produktivitas perkebunan (kelapa)	Ku/Ha	1.207,36	535,12	44%
		Produktivitas tanaman Hortikultura				
		Produktivitas tanaman Hortikultura (Cabe Rawit)	Ku/Ha	5,61	2,75	49%
		Produktivitas tanaman Hortikultura (Tomat)	Ku/Ha	3,67	1,37	37%
		Persentase Alat Mesin Pertanian yang Berfungsi dengan baik				
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Penggunaan Sarana Pertanian	Perse	76,00	35	46%
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	0,13	13%
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG)	Perse	38,45	2,08	5%
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	1	0,05	5%

SKPD/PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA s.d TRIWULAN II TAHUN 2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)		(2)		(3)	(4)	5=(4/3)
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	1	0,18	18%
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Efisiensi Reproduksi (Conception Rate / CR)	Per센	77,00	3	3,90%
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ekor	30,00	0	0%
3.27.02.2.06.02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ton	50,00	0	0%
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Percentase peningkatan penyediaan prasarana pertanian	Per센	72	25	35%
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Percentase Luas areal lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Per센	72,74	0	0%
3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Dokumen	1	0	0%
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian	Unit	35	0	0%
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang jalan usaha tani	Unit	11	0	0%
3.27.03.2.02.06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	20	0	0%
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	4	0	0%

SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA s.d TRIWULAN II TAHUN 2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)		(2)		(3)	(4)	5=(4/3)
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Percentase kesehatan hewan dan kesmavet Percentase Ternak yang mengalami gangguan penyakit menurun	Person	9	5	56%
3.27.04.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	1	0,5	50%
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Percentase keluar masuk ternak yang terawasi Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Person	92	45	49%
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Percentase Ternak yang mendapatkan pelayanan jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Person	25,42	13	51%
3.27.04.2.03.02			Laporan	2	1	50%
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Penurunan serangan OPT Tanaman Pangan, hortikultura dan Perkebunan Percentase Luas areal yang terkendali dari Bencana	Person	30	15	50%
3.27.05.2.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	53	18	34%
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Percentase peningkatan penyuluhan pertanian	Person	83,00	42	51%

SKPD/PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA s.d TRIWULAN II TAHUN 2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)		(2)		(3)	(4)	5=(4/3)
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Percentase Penyuluhan Pertanian	Per센	66,36	33,4	50%
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	6	3	50%
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	36	18	50%
3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	6	3	50%

Boroko, 04 Juli 2024



2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan pertanian untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan pertanian karena dampaknya yang signifikan di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis dapat diperoleh melalui analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman di masa dua tahun mendatang. Berdasarkan permasalahan dan hasil telaahan yang telah dilakukan, maka isu-isu untuk bidang pertanian di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mencakup aspek seperti perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, infrastruktur, lahan dan air, kepemilikan lahan, sarana produksi, sistem perbenihan dan perbibitan, peningkatan produktivitas, kelembagaan petani dan penyuluh, sumberdaya manusia, akses petani terhadap permodalan, keterpaduan antar sektor, dan kinerja pelayanan birokrasi pertanian. Isu-isu strategis tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Produktivitas dan daya saing produk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Produktivitas komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang diproduksi oleh petani di sentra-sentra produksi masih jauh di bawah potensi genetiknya, karena belum diterapkannya aplikasi paket teknologi sesuai anjuran. Berdasarkan penelitian dan praktek di lapangan, penggunaan

benih/bibit unggul diakui telah menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan peningkatan produksi pertanian. Untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, maka dikembangkan pula hilirisasi komoditas pertanian strategis, mencakup kegiatan pertanian secara terpadu mulai dari pengolahan, penanganan dan pemasaran hasil pertanian. Selain itu, sebagian besar produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan masih belum mampu mencapai standar mutu untuk memenuhi pasar domestik maupun ekspor. Untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan mutu melalui penerapan budidaya yang berdasarkan standar prosedur baku, serta mendorong petani agar menerapkan teknologi budidaya yang ramah lingkungan.

2. Perubahan iklim global dan meningkatnya kerusakan lingkungan

Dampak perubahan iklim global adalah terjadinya gangguan terhadap siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan, kenaikan permukaan laut, serta peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang dapat menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan. Di sektor pertanian, dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, eksplosi hama dan penyakit tanaman, serta pada akhirnya terjadi penurunan produksi pertanian. Oleh karena itu, diperlukan upaya khusus untuk pemetaan daerah rawan banjir dan kekeringan. Namun di tingkat lapangan, kemampuan para petugas lapangan dan petani dalam memahami data dan informasi prakiraan iklim masih sangat terbatas, sehingga kurang mampu melakukan antisipasi, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang dapat terjadi sehingga perlu peningkatan kemampuan petani dan petugas lapangan

dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan langkah antisipasi, mitigasi dan adaptasi yang diperlukan.

3. Ketersediaan infrastruktur dan sarana produksi Pertanian

a. Jaringan Irigasi

Kurangnya pembangunan jaringan irigasi yang baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat menurun. Kerusakan ini terutama diakibatkan banjir dan erosi, kerusakan sumber daya alam di daerah aliran sungai, bencana alam serta kurangnya pemeliharaan jaringan irigasi hingga ke tingkat usahatani. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan prasarana pengairan adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan daerah aliran sungai, pemeliharaan jaringan irigasi pedesaan, pengembangan sumber-sumber air alternatif dan berskala kecil antara lain melalui pemanfaatan teknologi pengambilan air permukaan dan bawah tanah, pembangunan dan pemeliharaan embung dan dam parit serta pemanfaatan sumber air tanah dan air hujan.

b. Jalan Pertanian (Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi)

Jalan usaha tani adalah jalan pertanian/jalan produksi yang dapat digunakan untuk mengangkut sarana produksi dari luar ke lahan usaha tani dan atau mengangkut hasil panen ke pasar dan atau ke unit pengolahan.

c. Prasarana usahatani lain yang sangat dibutuhkan

masyarakat dan pedagang komoditas pertanian namun keberadaannya masih terbatas adalah jalan usahatani, jalan produksi, pelabuhan yang dilengkapi dengan pergudangan berpendingin udara untuk komoditi hortikultura, laboratorium uji standar dan mutu, kebun dan greenhouse untuk penangkaran benih dan bibit, klinik konsultasi kesehatan tanaman, balai informasi dan promosi pertanian,

serta pasar-pasar yang spesifik bagi komoditas. Tantangan yang harus dihadapi ke depan adalah bagaimana menyediakan semua prasarana yang dibutuhkan petani tersebut dalam jumlah yang cukup, berada dekat dengan sentra produksi, dan biaya pelayanan yang terjangkau.

- d. Di sisi sarana produksi, permasalahan yang dihadapi adalah belum cukup tersedianya benih/bibit unggul bermutu, pupuk, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usaha tani, belum berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi, serta belum berkembangnya usaha penangkaran benih/bibit secara luas hingga di sentra produksi.

Pupuk merupakan komoditas yang seringkali menjadi langka pada saat dibutuhkan, terutama pupuk bersubsidi. Dengan keterbatasan penyediaan pupuk kimia, ternyata pengetahuan dan kesadaran petani untuk menggunakan dan mengembangkan pupuk organik sendiri, sebagai pupuk alternatif juga masih sangat kurang.

Tantangan untuk mengembangkan sarana produksi pertanian ke depan adalah bagaimana mengembangkan penangkar benih/bibit unggul dan bermutu, menumbuh kembangkan kelembagaan penyedia jasa alat dan mesin pertanian, mendorong petani untuk memproduksi dan meningkatkan pemakaian pupuk organik, serta mendorong petani untuk menggunakan pestisida dan obat-obatan tanaman yang ramah lingkungan.

4. Alih fungsi lahan serta status dan luas kepemilikan lahan

Kepemilikan lahan cenderung mengalami penurunan setiap tahun. Kondisi kepemilikan lahan tersebut antara lain disebabkan oleh meningkatnya konversi lahan pertanian untuk keperluan pemukiman dan fasilitas umum serta terjadinya fragmentasi lahan karena proses pewarisan, khususnya untuk lahan

beragroekosistem sawah dan lahan kering tanaman pangan. Selain itu status penguasaan lahan oleh sebagian besar petani belum memiliki legalitas yang kuat dalam bentuk sertifikat, sehingga lahan belum bisa dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh modal usaha melalui perbankan.

Alih fungsi lahan atau konversi lahan pertanian terutama lahan sawah tidak hanya menyebabkan kapasitas produksi pangan turun, tetapi juga degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, dan merupakan salah satu sebab semakin sempitnya luas garapan usahatani serta turunnya kesejahteraan petani sehingga kegiatan usaha tani yang dilakukan petani tidak dapat menjamin tingkat kehidupan yang layak baginya.

Tantangan ke depan untuk mengatasi terbatasnya pemilikan dan lemahnya status penguasaan lahan adalah bagaimana meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha tani, penataan kelembagaan pengelolaan lahan, serta penguatan status kepemilikan lahan. Untuk menekan laju konversi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang; regulasi atau peraturan; meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan; meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian serta pengendalian pertumbuhan penduduk.

5. Akses petani terhadap permodalan

Hingga saat ini kondisi masyarakat petani dihadapkan pada kecilnya skala penguasaan dan pengusahaan lahan petani yang mengakibatkan terbatasnya kemampuan petani untuk melakukan pemupukan modal melalui tabungan dan investasi. Selain itu petani juga belum memiliki kemampuan untuk mengakses sumber permodalan/lembaga keuangan formal, diantaranya diakibatkan oleh tidak mudahnya prosedur pengajuan kredit dan ketiadaan agunan yang dipersyaratkan.

Tantangan ke depan yang harus dikembangkan adalah bagaimana menjembatani kesenjangan manajemen antara lembaga perbankan formal dengan masyarakat petani yang tersebar di perdesaan. Perlu dilakukan pula pemberdayaan kelembagaan usaha kelompok dan diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga mandiri milik masyarakat petani perdesaan.

6. Kapasitas kelembagaan petani dan penyuluhan Pertanian

Kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat budaya dan sebagian besar berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usahatani dan usaha pertanian. Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Perhimpunan Petani Pemakai Air (P3A), Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) dihadapkan pada tantangan ke depan untuk menjadi kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan hukum atau dapat berintegrasi dalam koperasi yang ada di perdesaan.

7. Kinerja dan pelayanan birokrasi pertanian dalam menunjang pembangunan Pertanian

Sumber daya manusia aparat pertanian masih kurang memuaskan. Diperlukan pemberian internal agar aparat mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara efisien dan efektif. Pemberian mencakup upaya-upaya pergeseran sikap dan wawasan serta kompetensi aparat agar menjadi aparat yang profesional, hingga upaya penataan kelembagaan agar mampu menjawab tuntutan zaman yang terus berubah. Pembangunan sektor pertanian dan pangan tidak bisa berdiri sendiri, melainkan melibatkan banyak sektor terkait. Koordinasi antar sektor perlu lebih ditingkatkan.

8. Nilai tambah produk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan di pasar global

Karakteristik pertanian adalah berskala kecil dan lokasinya tersebar dengan tingkat produktivitas dan mutu produk yang rendah dan beragam. Dengan semakin terbukanya pasar dalam negeri terhadap produk impor pertanian sejenis serta ketatnya standar mutu di pasar ekspor yang kerap diberlakukan banyak negara di era globalisasi ini, maka kondisi tersebut akan semakin menekan dan mengancam daya saing produk-produk pertanian, baik di pasar domestik maupun ekspor. Diperlukan upaya untuk meningkatkan daya saing produk pertanian melalui peningkatan mutu dan produktivitas, pengembangan produk, derivasi produk serta memperluas pangsa dan negara tujuan ekspor yang didorong dengan upaya peningkatan kerjasama ekonomi antar wilayah (kawasan), baik dalam skala nasional (antar daerah)maupun kerjasama regional (antar negara).

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global;
2. Masih belum optimalnya tingkat kesuburan lahan;
3. Terbatasnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan,dan air;
4. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usahatani;
5. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh;
6. Rendahnya nilai tukar petani (NTP);
7. Terbatasnya pemasaran hasil pertanian dan perkebunan.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian dalam upaya pencapaian MISI 3 Pembangunan Daerah yaitu “Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Berbasis Pertanian, Perikanan

dan Pariwisata” dengan sasaran Meningkatkan kontribusi sektor Pertanian tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan pembangunan Pertanian antara lain :

1. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk Pertanian dengan menciptakan system pertanian yang ramah lingkungan melalui penerapan pertanian organik;
2. Penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah;
3. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur lahan, air, perbenihan/perbibitan dan penyediaan alat mesin pertanian/perkebunan;
4. Fasilitasi akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah\bagi petani kecil. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani dan petugas;
5. Melalui penyuluhan dan pelatihan serta penataan kelembagaan petani melalui reposisi kepengurusan dan penataan UPTD Pertanian Terpadu;
6. Penguatan kelembagaan usaha ekonomi produktif yang kokoh di perdesaan Pembentukan kawasan agropolitan.

2.3 Penelaahan Perubahan Usulan Program / Kegiatan perangkat daerah

Keterlibatan masyarakat dalam membangun pertanian di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara harus terus ditingkatkan. Melalui MUSREMBANG Tingkat Kecamatan diperoleh usulan-usulan dari masyarakat yang dikoordinir oleh BAPELITBANG. Dengan kondisi seperti ini diharapkan perencanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian dapat selaras dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Penyelarasannya juga diarahkan dengan program dan kebijakan pembangunan pertanian di tingkat Provinsi dan pusat.

Berdasarkan data hasil usulan masyarakat untuk program, kegiatan dan sub kegiatan di Dinas Pertanian tahun 2024 kegiatan-kegiatan yang diusulkan mengarah pada 3 Program yaitu Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian. Kebijakan/tindakan antara lain :

- a. Meningkatkan kompetensi aparatur lewat pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis.
- b. Pembinaan secara terus menerus tentang disiplin aparatur.
- c. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sesuai kebutuhan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahunan. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang dapat diukur dalam jangka waktu tertentu. Hasil evaluasi RPJM Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023 memberikan informasi beberapa indikator tujuan dan sasaran yang telah dilaksanakan perlu menjadi perhatian untuk dilanjutkan kembali dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) untuk periode 2024-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang merupakan turunan dari RPJPD dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah gambaran dari arah pembangunan atau kondisi masa depan dalam rangka mendukung Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 3 (Tiga) tahun yang akan datang. Renstra menunjukkan apa yang menjadi Prioritas Program Pembangunan pada Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara baik dalam upaya mewujudkan dukungan penuh maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan dalam upaya pencapaian RPD Tahun 2024 - 2026 yaitu terwujudnya peningkatan produksi komoditas pertanian, perkebunan, peternakan dan SDM penyuluhan.

Sasaran pembangunan merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Perumusan sasaran juga memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah serta memiliki indikator yang dapat diukur untuk pencapaian tujuan pembangunan. Sasaran yang ditetapkan yaitu Meningkatnya produksi pertanian dan Meningkatkan Produksi Peternakan.

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJATUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
				1 (2024)	2 (2025)	3 (2026)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi perangkat daerah	Nilai akuntabilitas kinerja SKPD (LKjIP)	BB	BB	BB
			Jumlah temuan hasil pemeriksaan laporan keuangan SKPD (oleh BPK)	0	0	0
2.	Meningkatnya Pendapatan masyarakat	Meningkatkan Produksi pertanian	Produksi Tanaman Pangan			
			Padi (Ton)	59.600	59.700	59.800
			Jagung (Ton)	47.650	47.800	47.950
			Produksi Tanaman Hortikultura			
			Cabai (Ton)	31,97	36,76	38,59
			Tomat (Ton)	8,85	9,73	10,21
			Produksi Tanaman Perkebunan			
			Kelapa (Ton)	15.575	15.578	15.580
		Meningkatkan Produksi Peternakan	Produksi Daging Sapi	41.500,00	42.000,00	42.500,00
			Produksi Daging Kambing	3.000,00	3.200,00	3.500,00
			Populasi ternak Sapi	17.700,00	17.850,00	18.000,00
			Populasi ternak Kambing	5.073,00	5.224,00	5.539,00

3.2 Perubahan Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2024 sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan masyarakat yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Bagi satuan kerja pelaksana program, Renja Perubahan Tahun 2024 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2024 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam Renja Perubahan Tahun 2024 maka secara terstruktur telah ditetapkan program dan kegiatan benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Disamping itu seluruh yang bidang di dinas pertanian membuat rencana aksi dalam upaya perencanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan Renja Perubahan Tahun 2024 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip-prinsip akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas

juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Fokus sasaran rencana kerja dinas pertanian adalah peningkatan produksi, perbaikan mutu hasil dan peningkatan nilai tambah petani, hal ini sinergi dengan program pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka menekan laju pertumbuhan angka kemiskinan. Upaya konkret lainnya yang menjadi sasaran rencana kerja dinas pertanian adalah perlindungan lahan pertanian untuk penggunaan lainnya. Dalam kebijakan penganggaran di dinas pertanian telah merupakan skala prioritas anggaran berdasarkan kegiatan-kegiatan yang mendesak untuk dilaksanakan dengan asumsi capaian output dan outcome yang jelas. Besar harapan kiranya program/kegiatan yang telah direncanakan di tahun 2024 dapat berkontribusi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.

Tabel 3.2
Rekapitulasi Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2024 Menurut Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		PAGU APBD 2024	RENCANA PAGU INDIKATIF PERUBAHAN 2024	BERTAMBAH / (BERKURANG)	PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
		APBD 2024	P-APBPD 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7=5	8	9	10		
DINAS PERTANIAN											
1	URUSAN PILIHAN Pilihan Pertanian Dinas Pertanian	Efektifitas pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	100	17.723.044.084	18.375.555.521	652.511.437	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	Dinas Pertanian
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					10.160.652.165	10.843.163.602	682.511.437			
	Administrasi Keuangan	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	9.626.097.274	10.151.687.653	525.590.379			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	129 Orang/14 Bulan	129 Orang/14 Bulan	9.626.097.274	10.151.687.653	525.590.379			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100	14.647.600	43.940.800	29.293.200			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	-	-	-			
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5	5	14.647.600	43.940.800	29.293.200			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	100	156.067.751	209.668.351	53.600.600			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	1	2.395.000	2.395.000	-			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	1	1	44.969.251	44.969.251	-			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	1	1	16.055.000	16.055.000	-			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	-	-	-			
	Penyelegaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelegaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	92.648.500	146.249.100	53.600.600			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	-	48.158.600	48.158.600			

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		PAGU APBD 2024	RENCANA PAGU INDIKATIF PERUBAHAN 2024	BERTAMBAH / (BERKURANG)	PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		APBD 2024	P-APBDP 2024				NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9	10
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	6	7	-	48.158.600	48.158.600	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	2	-	-	-	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	100	216.096.440	241.965.098	25.868.658	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	9.912.500	9.912.500	-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	1	1	34.954.500	60.823.158	25.868.658	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	1	1	171.229.440	171.229.440	-	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	100	147.743.100	147.743.100	-	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	66	66	61.059.100	61.059.100	-	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	2	2	41.680.000	41.680.000	-	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	60	60	11.820.000	11.820.000	-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	7	7	33.184.000	33.184.000	-	
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan penyediaan prasarana pertanian	Persen	72	72	5.612.379.568	5.612.379.568	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Luas areal lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Persen	7274	7274	12.385.500	12.385.500	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Dokumen	1	1	12.385.500	12.385.500	-	Dinas Pertanian

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		PAGU APBD 2024	RENCANA PAGU INDIKATIF PERUBAHAN 2024	BERTAMBAH / (BERKURANG)	PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		APBD 2024	P-APBDP 2024				NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9	10
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Efisiensi Reproduksi (Conception Rate / CR) Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persen Ekor Ton	77 7 50	77 7 50	63.729.315 49.875.160 13.854.155	63.729.315 49.875.160 13.854.155	-	
4	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Penurunan serangan OPT Tanaman Pangan hortikultura dan Perkebunan Persentase Luas areal yang terkendali dari Bencana Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan	Persen Persen Ha	30 33 53	30 33 53	23.808.600 23.808.600 23.808.600	23.808.600 23.808.600 23.808.600	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah
5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan penyuluhan pertanian Persentase Penyuluhan Pertanian Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Persen Persen Unit Unit Unit	83 6636 6 36 6	83 6636 6 36 6	724.037.262 724.037.262 144.999.690 19.320.072 559.717.500	724.037.262 724.037.262 144.999.690 19.320.072 559.717.500	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah
6	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase kesehatan hewan dan kesmavet Persentase Ternak yang mengalami gangguan penyakit menurun Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persen Persen Laporan	9 4 1	9 4 1	600.187.214 444.018.664 444.018.664	570.187.214 444.018.664 444.018.664	(30.000.000) - -	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		PAGU APBD 2024	RENCANA PAGU INDIKATIF PERUBAHAN 2024	BERTAMBAH / (BERKURANG)	PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		APBD 2024	P-APBDP 2024				NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9	10
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Percentase keluar masuk ternak yang terawasi	Persen	92	92	75.521.950	60.521.950	(15.000.000)		
	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	75.521.950	60.521.950	(15.000.000)		
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Percentase Ternak yang mendapatkan pelayanan jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner	Persen	2542	2542	80.646.600	65.646.600	(15.000.000)	

Boroko 04 Juli 2024


 Kepala Dinas,
SISKA NURCAHYANI BABAY, S.Pt, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19800416 200604 2 009

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Rencana Kerja Perubahan perangkat daerah Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara secara umum telah berusaha melakukan perencanaan yang mengarah kepada rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Bolaang Mongondow Utara.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertanian tahun 2024 merupakan acuan setiap unit kerja dalam lingkup Dinas Pertanian, masyarakat, stake holder lainnya dalam pelaksanaan pembangunan pertanian sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program dan kegiatannya. Renja tersebut mengacu kepada RKPD Dinas Pertanian dan Tahun 2024–2026.

Didalamnya memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai triwulan II tahun 2024, serta permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renja tersebut, seluruh pihak yang terkait diharapkan memberikan dukungan dan partisipasi yang optimal dalam pelaksanaannya selama tahun anggaran 2024.

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan dengan disusunnya Renja Perubahan Dinas Pertanian Tahun 2024 adalah untuk mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien serta memaksimalkan capaian kinerja pada masing-masing program untuk mendukung tercapainya target, tujuan dan sasaran strategis pembangunan pertanian.

Perencanaan yang telah disusun diharapkan dapat terealisasi sepenuhnya dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dan selaras dengan kebijakan daerah khususnya pembangunan daerah dibidang

pertanian secara luas. Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.



DINAS PERTANIAN